
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA KARYASARI KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT

Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, Rostiena Pasciana

Universitas Garut Indonesia

Abstract

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a type of social food assistance provided by the government to Beneficiary Families. BPNT distribution is done to alleviate poverty. The purpose of this study is to explain the execution of the non-cash food assistance program policy and to examine the supporting and inhibiting elements for the policy's implementation in Karyasari Village, Banyuresmi District, Garut Regency. This study employs qualitative research methodologies, which are evaluated in terms of process, results, and policy implications. The Non-Cash Food Assistance strategy has been implemented successfully in Karyasari Village. This is seen in the execution of proper policy standards and targets, resources that support aid distribution, communication across organizations, and implementing agents that understand field conditions. A robust communication mechanism, dependable human resources, and coordination among involved parties are factors that enable the operation of the Non-Cash Food Assistance policy. However, there are still obstacles impeding the execution of the Non-Cash Food Assistance program, such as beneficiaries of help who are not on target and information that is not well received due to the individuals receiving aid's low education.

Keywords:

Non-cash Food Assistance; Policy Implementation; Garut District

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran BPNT dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dinilai dalam konteks proses, hasil, dan dampak kebijakan. Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilihat dari penerapan standar dan sasaran kebijakan yang sudah sesuai, sumber daya yang mendukung penyaluran bantuan, komunikasi antar organisasi, agen pelaksana yang memahami kondisi lapangan dan keluarga penerima manfaat serta sikap para pelaksana dalam melakukan penyaluran bantuan. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai adalah proses komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang handal dan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai yaitu masih terdapat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, informasi yang kurang bisa diterima dengan baik karena rendahnya pendidikan masyarakat penerima bantuan.

Kata kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Implementasi Kebijakan, Program

Article history:

Submission November 30, 2023

Revision December 06 2023

Accepted December 15, 2023

Published December 31, 2023

*Corresponding author

Email: liajuliasih@fisip.uniga.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan sudah menjadi kondisi yang dianggap biasa di berbagai negara berkembang salah satunya Indonesia, Masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup tidak layak. Seseorang disebut miskin karena tidak punya pendapatan untuk kebutuhan makan dan pakaian (Aspar et al., 2020). Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Hal ini membuat seorang individu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 sebagai kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bantuan sosial pangan berbentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang hanya dapat berlaku ketika membeli bahan pangan melalui e-warung yang telah bekerja sama dengan bank (Kurniawan, 2019).

Penerima program ini merupakan masyarakat miskin yang termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, memberikan nutrisi baik kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Basriati, 2021).

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 terdapat 12.038.500 jiwa. Sementara itu, berdasarkan sensus penduduk jumlah penduduk tahun 2020 terdapat 270.203.917 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,45 % dari jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang melahirkan beberapa kebijakan sebagai upaya mengatasi permasalahan kemiskinan.

Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Jawa Barat per September tahun 2020 adalah 48.274.162. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat per September tahun 2020 adalah 3.004.950. Terdapat sekitar 6,2 % penduduk Jawa Barat yang termasuk ke kategori masyarakat miskin. Sementara itu, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor 5.427.068, disusul oleh Kabupaten Bandung 3.623.790, Kabupaten Bekasi 3.113.017 Kabupaten Sukabumi

2.725.450 dan Kabupaten Garut. 2.585.607. Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang termasuk lima besar penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Desa Karyasari merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyuresmi yang memiliki penduduk miskin dan mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2018. Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Garut mengalami kenaikan sehingga hal ini menarik perhatian karena adanya penurunan angka kemiskinan di Desa Karyasari dari Tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, terdapat 752 kepala keluarga miskin sedangkan pada tahun 2021 terdapat 649 kepala keluarga miskin di Desa Karyasari (Lihat Tabel 1), akan tetapi hanya 484 kepala keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (Lihat tabel 2). Terdapat penurunan 93 Kepala Keluarga miskin di Desa Karyasari selama satu tahun.

Tabel 1.

Rekapitulasi Data Masyarakat Kurang Mampu Desa Karyasari Tahun 2021

No	RW	KK 2020	KK Miskin 2020	KK 2021	KK Miskin 2021
1	01	151	80	145	80
2	02	142	60	142	57
3	03	160	76	153	70
4	04	114	48	101	35
5	05	114	58	142	51
6	06	126	62	124	55
7	07	111	59	103	40
8	08	226	135	231	120
9	09	95	50	92	38
10	10	98	52	95	35
11	11	124	72	123	68
Jumlah		1424	752	1451	649

Sumber : Arsip Desa Karyasari, 2021

Tabel 2.

Rekapitulasi Penerima Bantuan Program BPNT Desa Karyasari Tahun 2021

No	RW	Jumlah KPM
1	01	65
2	02	45
3	03	35
4	04	25
5	05	69
6	06	40
7	07	50
8	08	50
9	09	36
10	10	59
11	11	60
Jumlah		484

Sumber : Arsip Desa Karyasari, 2021

Beberapa penelitian tentang Bantuan Pangan Non Tunai sudah dilakukan diantaranya penelitian oleh Ishak Fadlurrohimi yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai-Studi Kasus di Kota Cimahi (Fadlurrohimi et al., 2020). Penelitian ini berfokus pada implementasi program pada faktor sosiologis, lingkungan internal, perencanaan organisasi dan sumber daya keuangan. Selanjutnya terdapat penelitian oleh M. Hidayat Panuntun Muslim yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kuranji Kota Padang (Muslim et al., 2019).

Penelitian ini menganalisis implementasi program dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Dalam penelitian ini mencari faktor-faktor penghambat terlaksananya program Bantuan Pangan Non Tunai serta mencari solusinya. Selanjutnya penelitian karya Amelia Eka Sari dkk dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro (Sari et al., 2019). Penelitian ini fokus pada implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori Van Matter dan Van Carl Horn. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, disini penulis fokus pada kebijakan Program Bantuan Non Tunai yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan analisis implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di desa karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.

Pada saat melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa indikasi masalah yang terjadi di lapangan yaitu: (1) Ditemukan warga penerima BPNT yang tidak memiliki saldo di rekening. Dari 11 RW di Desa Karyasari terdapat 60 KPM dengan saldo nol rupiah. (2) Kurang informasi yang jelas terkait penggunaan kartu sehingga banyak KPM yang salah melakukan input PIN ketika melakukan transaksi, akibatnya banyak kartu yang terblokir dan harus diperbaiki pada agen bank setempat. (3) Tidak adanya keterbukaan atas harga dan kualitas pangan yang akan diterima oleh masyarakat. KPM menerima beras atau telur yang tidak memenuhi kualitas yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan. Tujuan ideal kebijakan sulit direalisasikan karena harus berhadapan dengan kondisi di lapangan (Rangkuti & Maksu, 2019). Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa implementasi bertugas untuk membangun jaringan supaya tujuan kebijakan publik dapat terealisasi melalui koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam instansi pemerintah (Akib, 2010). Berdasarkan permasalahan yang terjadi, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana data yang disediakan berbentuk kata, kalimat dan gambar. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell, 2014). Penelitian ini fokus pada masalah yang bersifat aktual yaitu gambaran tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara terhadap lima orang informan yaitu TKSK kecamatan Banyuresmi, Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Desa Karyasari, pemilik E-Warung di Desa Karyasari dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori Van Meter and Van Horn dalam penelitian ini. Terdapat enam variabel dalam menganalisis implementasi kebijakan (Subarsono, 2015) yaitu:

1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan standar dan tujuan implementasi kebijakan program BPNT di Desa Karyasari dilihat dari pedoman dan standar program BPNT yang jelas, konsisten serta sesuai dengan prinsip dasar penyaluran bantuan untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pedoman yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai. Melalui pedoman tersebut, ditetapkan sasaran penerima bantuan, besaran bantuan yang diberikan dan siapa saja yang terlibat dalam penyaluran bantuan sampai pada tahapan evaluasi setelah penyaluran bantuan.

Sasaran bantuan adalah masyarakat Desa Karyasari yang termasuk dalam kriteria masyarakat miskin dan sudah terdaftar di Data Terpadu Tenaga Kesejahteraan Sosial (DTTKS). KPM yang sudah terdaftar akan mendapatkan kartu kombo (KKS) untuk proses penyaluran bantuan. Sasaran yang tepat ini harus disertai dengan kualitas komoditas yang didapatkan oleh masyarakat. Setiap bulannya, KPM menerima bantuan melalui rekening Kartu Kombo dengan saldo sebesar Rp. 200.000 dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan yang telah dipaket yaitu 10 kg beras, 1 kg daging ayam, protein nabati (tahu) 10 buah, 1 kg sayuran (kentang) dan 1 kg buah-buahan.

Keberhasilan implementasi BPNT dalam melaksanakan kebijakan program bantuan di Desa Karyasari, melihat bahwa standar dan sasaran kebijakan akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan program dapat ditinjau lebih dalam mengenai tujuan

dari pelaksanaan program sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau sebaliknya. TKSK Desa Karyasari menjelaskan tujuan dari program ini untuk mengurangi beban pengeluaran khususnya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tergolong miskin, meningkatkan gizi seimbang, ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta tidak ada lagi istilahnya tidak bisa membeli kebutuhan pokok untuk memenuhi gizi yang seimbang.

Tujuan kebijakan penyaluran BNPT ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam Pasal 2 bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras, telur, sayuran, maupun bahan pangan lain yang bisa didapatkan oleh KPM, memperoleh gizi yang seimbang, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas dan harganya, dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

2) Sumber Daya

Pada berbagai kebijakan harus disertai dengan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang berkecukupan baik secara kualitas maupun kuantitas implementor yang bisa mencakup semua kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial merupakan kecukupan modal investasi atas sebuah program, kedua sumber daya ini tidak lain untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan dari pelaksanaan program bantuan pangan non tunai secara maksimal.

Menurut Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Desa Karyasari jumlah petugas sudah cukup memadai, mulai dari TKSK mendampingi masyarakat, pihak desa melakukan sosialisasi program yang dibantu oleh dinas sosial. Terdapat 3 orang pendamping, yaitu 1 orang TKSK dan 2 orang Kesra dari desa yang menjadi pelaksana dalam penyaluran bantuan pangan kepada sebanyak 749 jumlah KPM yang terdaftar di desa dengan sebaran pada 11 desa. Penambahan jumlah ini merupakan data jumlah terbaru yang telah dilakukan perbaruan data yang berasal dari Desa Karyasari. Sebanyak 749 jumlah KPM ini dinilai terlalu banyak untuk dikoordinasi oleh 1 TKSK saja, selain itu 2 orang Kesra dari desa bertugas membantu TKSK yang terjun langsung mengawasi proses berjalannya penyaluran bantuan adalah dari TKSK, menimbang bahwa anggota yang tersebar secara merata tersebut memiliki wilayah yang berbeda diantara satu dengan yang lainnya, dibutuhkan tambahan pendamping agar program ini bisa disalurkan secara maksimal. Bantuan ini yang langsung di transfer ke rekening KPM sebesar Rp. 200.000/bulan dan tidak bisa diambil tunai.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana tentu memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian ini dapat dilihat melalui pendidikan, kompetensi pada bidang dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh setiap tenaga TSKK. Menurut salah satu TSKK, ideal menjadi tenaga TSKK minimal telah memiliki gelar sarjana. Meski begitu, TSKK tersebut hanya merupakan lulusan SMA saja karena pada pelaksanaannya tidak mempertimbangkan pendidikan terakhir pelaksana. Kemudian salah satu petugas menyatakan bahwa di desa tidak mementingkan latar belakang pendidikan karena yang utama dapat aktif di lapangan serta dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara baik. Tambahnya, apabila memiliki latar belakang yang tinggi dapat ditugaskan oleh dinas sosial yang bertugas. Rata-rata pendidikan terakhir tenaga pendamping TSKK merupakan lulusan SMA.

Selanjutnya tim pendamping memiliki pengalaman di bidang penyaluran bantuan, pengalaman utama ini penting bagi para pendamping agar lebih sigap dalam membantu KPM. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat membuat KPM lebih mudah untuk menyampaikan kendala langsung kepada TSKK. Selain memiliki pengalaman perlu disertai kemampuan yang ahli pada bidangnya, agar setiap tugas yang diberikan dengan mudah dilaksanakan. Penilaian ini menjadi nilai penting bagi keberhasilan karakteristik tenaga pelaksana yang berkualitas memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut masyarakat Desa Karyasari selain petugas yang berkompeten di bidangnya, para tenaga pelaksana harus berperilaku santun, ramah, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga penerima bantuan ini merasa dilayani dengan baik.

4) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini indikator dari komunikasi salah satunya transmisi menurut Eswards III yang merupakan upaya menyalurkan bantuan sosial kepada para pihak yang berkepentingan dan terlibat. Sosialisasi diberikan sebagai bimbingan kepada penerima terkait pelaksanaan BPNT, mengingat masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham mengenai bantuan, sehingga perlu diberikan informasi sebaik mungkin melalui sosialisasi. Media sosialisasi dilakukan melalui surat pemberitahuan, poster spanduk, melalui pemutaran video, siaran di media masa dan sosialisasi dari rumah ke rumah penerima KPM.

Tak hanya penerima bantuan, pemilik e-warung pun diberikan sosialisasi sebagai arahan untuk melayani masyarakat, sehingga KPM merasa puas ketika dilayani. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan setiap terjadi perubahan informasi yang berlaku dari tingkat pusat agar masyarakat tetap mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi sehingga tidak merasa kebingungan dan terjadi kesalahan. Informasi yang disampaikan

melalui proses sosialisasi tersebut disampaikan secara jelas dan konsisten tidak berubah, adapun perubahan yang ada berasal dari perubahan kebijakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Komunikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk membagikan informasi.

Pedoman edukasi dan sosialisasi menjadi acuan penting yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari kendala yang terjadi di lapangan, menurut TKS K yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi terdapat kendala yang cukup serius yaitu penerima bantuan tidak berasal dari usia yang sama, faktor usia membuat TKS K cukup kewalahan karena perlu berulang kali hingga semua anggota menerima dengan baik informasi yang disampaikan.

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan masih banyak dari mereka yang tidak memenuhi undangan dengan berbagai alasan yang seharusnya berkomitmen untuk tetap hadir. Menimbang betapa pentingnya pemahaman informasi pemanfaatan bantuan bagi para KPM. Agar terhindar dari alasan informasi tidak disampaikan dengan jelas dan tidak ada lagi keluhan-keluhan yang serius dari penyaluran bantuan.

5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap para pelaksana atau disposisi. Sikap yang dimaksud adalah respon dari para pelaksana atas kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini terjadi karena formulasi kebijakan tidak terlibat dengan masyarakat setempat yang dinilai lebih mengerti permasalahan yang terjadi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai permasalahan di lapangan dengan menghubungkan pada teori yang ada, demikian hasil observasi di lapangan. Masyarakat Desa Karyasari memberi reaksi yang baik karena mereka merasa banyak dibantu. Selain itu, pemilik e-warung mendukung keberlangsungan program ini karenanya warung/toko miliknya menjadi lebih ramai dari biasanya. Selanjutnya fasilitas pendukung transaksi menjadi salah satu faktor pendukung. Apabila mesin mengalami kerusakan menyebabkan proses transaksi pada penyaluran bantuan terhambat. Ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga dilakukan pemantauan secara berkala demi kelancaran dan keberhasilan program ini. Sikap atau kecenderungan para pelaksana yang terlibat dalam program bantuan BPNT di Desa Karyasari sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

6) Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik para kelompok penting. Pengukuran pada kondisi ini dilihat dari bagaimana respon lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan serta keberlangsungan dari proses implementasi kebijakan program BPNT. Salah satu contoh adalah jika lingkungan

sosial dan ekonomi dalam kondisi yang tidak kondusif kemudian terjadi sumber masalah yang serius, dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Sekalipun dampak dari masing-masing sistem cukup kecil, dapat berimbas terhadap pencapaian badan pelaksana. Kondisi lingkungan ekonomi di Desa Karyasari terbilang belum kondusif sehingga dengan adanya e-warung diharapkan dapat meningkatkan ekonomi bagi KPM. Selain itu, lingkungan sosial harus bisa merespon dengan baik adanya program bantuan, sebagaimana yang dirasakan oleh salah satu KPM yang merasa terbantu karena dapat membeli kebutuhan pokok yang berkualitas sehingga sangat mendukung keberlangsungan program BPNT ini.

Tak hanya itu, koordinasi dalam penyaluran bantuan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini didukung oleh peran penting dari para kelompok kepentingan seperti pendamping TKSK dan pihak pemerintah desa yang saling mendukung dalam pelaksanaan program BPNT ini. Menurut salah satu pemilik e-warung, koordinasi ini membantu proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pendamping, pihak desa juga pihak bank melakukan pengecekan secara teratur ketika dalam tahap pencairan. Pengecekan ini untuk mengetahui kualitas barang yang nantinya akan dikonsumsi oleh para penerima BPNT. Berdasarkan observasi di lapangan mengenai kondisi lingkungan sosial, ekonomi bahwa di lingkungan sosial Desa Karyasari menggambarkan program BPNT mampu menjadi penyokong kebutuhan ekonomi pangan KPM. Banyak dari masyarakat yang bukan penerima bantuan dengan adanya bantuan ini menjadi penyuplai komoditi bantuan. Dapat disimpulkan dengan adanya program ini dapat membantu satu sama lain.

Implementasi Kebijakan BPNT tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung keberhasilan program, adapun sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa faktor pendukung keberhasilan disebabkan oleh proses komunikasi yang telah dilaksanakan dengan baik, didukung oleh sumber daya manusia yang tersedia dalam melakukan penyaluran bantuan, program BPNT diterima dengan baik oleh masyarakat baik itu selaku penerima bantuan maupun masyarakat umum, dan didukung oleh proses koordinasi yang terjalin dengan baik di antara para pihak berkepentingan. Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat implementasi BPNT hal ini dipengaruhi oleh isi kebijakan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh dimana masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, informasi yang tidak diterima dengan baik disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan usia penerima di atas 50 tahun sehingga lambat menerima informasi yang disampaikan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan BPNT di Desa Karyasari sudah dilaksanakan dengan baik Standar dan tujuan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karyasari

sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Sasaran kebijakan dari bantuan ini merupakan masyarakat miskin yang telah terdaftar pada DTKS oleh dinas sosial. Program BPNT telah didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Terdapat faktor-aktor yang mendukung proses penyaluran seperti pemerintahan desa karyasari, tenaga pelaksana sosial TKSK, masyarakat setempat, agen e-warung dan bank penyalur.

Agen pelaksana merupakan individu yang berpengalaman, memahami kondisi penerima bantuan di wilayahnya serta berkompeten menangani program penyaluran bantuan. Penyampaian informasi mengenai bantuan sudah disampaikan se jelas mungkin, perubahan informasi yang ada langsung disampaikan kepada semua pihak baik kepada agen e-warung serta keluarga penerima manfaat. Walaupun demikian masyarakat masih kurang dalam memenuhi undangan pada proses sosialisasi, hal ini menyebabkan komunikasi yang terhambat. Para pelaksana sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Terdapat pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh pendamping sosial terkait dengan kelayakan alat transaksi serta proses penyaluran kepada KPM, hal ini meminimalisir terjadinya kendala yang serius pada saat penyaluran.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Aspar, Sakaruddin, M., & Syakhrudin, D.N. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 305–325.
- Basriati. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makasar. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (B. B. Vicki Knight, Kalie KOscielak (ed.); 4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Fadlurrohimi, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Kurniawan, A. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>

-
- Muslim, H. P., Eriyanti, F., & Mubarak, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 60–68. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.19>
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Sari, A. E., Kusbandrijo, B., & Murti, I. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). 126–132. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/43.pdf>
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.